

**PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PASAL 140 PERATURAN  
DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG  
TRANSPORTASI**

**(Studi di Kota Administrasi Jakarta Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh :**

**MICHAEL VARULLAH**

**NIM. 125010107111180**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PASAL  
140 PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI

Identitas Penulis

a. Nama : Michael Varullah  
b. NIM : 125010107111180

Konsentrasi

: Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu penelitian : 3 bulan

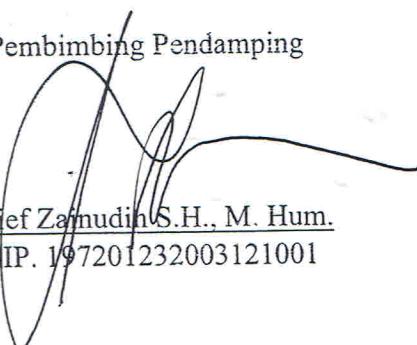
Disetujui pada tanggal : 27 Februari 2018

Pembimbing Utama



Agus Yulianto S.H., M.H.  
NIP. 195907171986011001

Pembimbing Pendamping

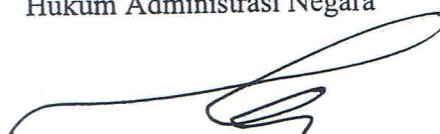


Arief Zamudin S.H., M. Hum.  
NIP. 197201232003121001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi S.H., M.Hum.  
NIP. 196008101986011002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PASAL 140 PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI  
(Studi di Kota Administrasi Jakarta Utara)**

**Oleh :**

**MICHAEL VARULLAH**

**125010107111180**

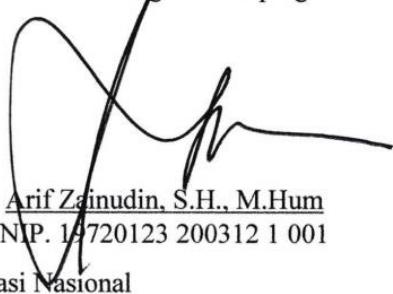
Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : **21 MAR 2018**

Pembimbing Utama



Agus Yulianto, S.H., M.H  
NIP. 19590717 198601 1 001

Pembimbing Pendamping

  
Arif Zainudin, S.H., M.Hum  
NIP. 19720123 200312 1 001

Ketua Bagian Hukum Administrasi Nasional



Lutfi Effendi S.H., M.Hum.  
NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya

  
Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.  
NIP. 19620805198802 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemampuan serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PASAL 140 PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI”**.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa aktivitas ini dapat berjalan baik disebabkan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu penulis merasa berkewajiban menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Lutfi Effendi S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Agus Yulianto S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama.
4. Bapak Arief Zainudin S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan arahan yang berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Papi Dedi Suryadi dan Mami Suhannah selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moril untuk penulis.
6. Dewi Sri Juliana selaku kakak penulis yang telah memberikan dukungan moril untuk penulis.
7. Medy Syari Khalifah Anggari Raharjo selaku pacar penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk terus menyelesaikan skripsi.
8. Keluarga Besar Partai Mahasiswa Pinggiran.
9. Keluarga Besar Gazebo FH UB
10. Aldebaran, Ardan, Dani, Syarieff, David, yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk terus menyelesaikan skripsi.
11. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan banyak bantuan maupun dukungan atas penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca yang dapat membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang mambangun untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Kata pengantar ini diakhiri dengan harapan semoga laporan ini dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana mestinya oleh banyak pihak. Amin.

Malang, 13 Maret 2018

Michael Varullah

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	ix
<b>RINGKASAN .....</b>	x
<b>SUMMARY .....</b>	xi
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Pustaka .....	10
1. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Dareah .....	10
2. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas .....	16
a. Sejarah Lahirnya Peraturan Lalu Lintas di Indonesia .....	16
b. Peraturan yang Mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Masih Berlaku di Indonesia .....	18
c. Transportasi dan Parkir .....	18
3. Kajian Umum tentang Peran Serta Masyarakat .....	23
a..Pengertian Masyarakat .....	23
b. Ciri- Ciri Masyarakat .....	27
c. Peran Serta .....	28
d. Bentuk – Bentuk Peran Serta Masyarakat .....	31

e. Tingkatan Peran Serta .....	32
f. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat .....	34

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	36
B. Metode Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian .....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Populasi dan Sampel .....	39
1. Populasi .....	39
2. Sampel .....	39
G. Teknik Analisis Data .....	40
H. Definisi Operasional .....	40

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pelanggaran Parkir di Kota Jakarta .....	43
B. Peran Serta Masyarakat terhadap Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi.....	47
1. Faktor Hukum .....	56
2. Faktor Penegak Hukum .....	57
3. Faktor Masyarakat .....	58
C. Upaya Pihak Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara dalam Menegakkan Pasal 140 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kewajiban Memiliki Parkir Pribadi .....	60
1. Upaya Preventif .....	60
2. Upaya Represif .....	61

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
---------------------	----

B. Saran .....	64
----------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermobil dan Persentase Kemacetan di Jakarta Utara .....	46
Tabel 2. Jawaban Responden Terkait Wajib Memiliki Parkir Pribadi atau Garasi .....	53
Tabel 3. Alasan Responden Memiliki Parkir Pribadi .....	54
Tabel 4. Alasan Responden Tidak Membuat Parkir Pribadi .....	57
Tabel 5. Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Mereka Terhadap Pasal 140 Ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 2014 .....	59

## DAFTAR LAMPIRAN

- |            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Lampiran 1 | : Surat Penetapan Bimbingan Skripsi |
| Lampiran 2 | : Kartu Bimbingan Skripsi           |
| Lampiran 3 | : Surat Keterangan Deteksi Plagiasi |
| Lampiran 4 | : Kuesioner                         |

**PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PASAL 140  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 5  
TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI.**

Michael Varullah, Agus Yulianto, Arif Zainuddin

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Email : [varullahmichael@gmail.com](mailto:varullahmichael@gmail.com)

**Ringkasan**

Saat ini, terjadi invasi besar-besaran oleh kendaraan pribadi yang membutuhkan proporsi ruang yang cukup luas, menyebabkan kapasitas jalan semakin sempit dan berujung terjadinya kemacetan. Pada kenyataannya sampai saat ini pemerintah belum mampu mewujudkan moda transportasi umum yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Masih banyaknya masyarakat yang tidak menyediakan garasi sesuai kendaraan yang dimilikinya, masih banyak masyarakat yang memarkir kendaraan di jalan lalu lalang kendaraan lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji persoalan hukum yang dilakukan dengan cara langsung mengunjungi lokasi penelitian. Dalam hal ini konteks penelitian empiris adalah penelitian terhadap pelaksanaan perundang-undangan. Teknik yang digunakan berupa data primer yang menggunakan observasi untuk menelaah lebih dalam mengenai permasalahan yang didukung dengan studi literatur wawancara serta dokumentasi yang dilakukan kepada pihak-pihak Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara, serta menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada masyarakat Kelurahan Tugu Utara. Hasil yang diperoleh adalah kebanyakan masyarakat DKI Jakarta khususnya Tugu Utara tidak memiliki parkir pribadi atau garasi. Masyarakat masih sedikit peran sertanya dalam penegakan pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi dan kewajiban dalam memiliki parkir pribadi di Jakarta Utara yang berjalan kurang efektif dan kurang ditaati oleh para pemilik kendaraan bermobil di Jakarta Utara.

Kata Kunci: **Peran Serta Masyarakat, Kewajiban, Garasi, Transportasi**

**PUBLIC PARTICIPATION REGARDING ARTICLE 140 OF LOCAL  
REGULATION OF DKI JAKARTA PROVINCE NUMBER 5 YEAR 2014  
ON TRANSPORTATION**

Michael Varullah, Agus Yulianto, Arif Zainuddin

**Faculty of Law Universitas Brawijaya**

Email : [varullahmichael@gmail.com](mailto:varullahmichael@gmail.com)

**Summary**

Currently, a massive invasion by private vehicles require a large proportion of space which causing in narrower road capacity and lead to congestion. In fact, the government has not been able to actualize the public transportation modes which are comfortable and safe for the community to date. There are still many people who do not provide the appropriate garage for their vehicle owned and parked their vehicles on the road. The type of research used in this paper is empirical juridical research with aims to examine the legal issues conducted by direct visit the research location. In this context, the empirical research is the study of how the implementation of legislation. Technique used in the form of primary data is observation to deeper analyze about the problems supported by the study of literature, interview and documentation done to the Sub Department of Transportation of North Jakarta, and also using questionnaires addressed to community of North Tugu Village. The result obtained is that most people of DKI Jakarta, especially North Tugu Village do not have their private parking or garage. Thus, the community still less participates in the enforcement of Article 140 paragraph (1) and (2) Law number 5 of 2014 on transportation proved by the failure to comply with the obligation to own private parking in North Jakarta which runs less effective and less adhered by car owners in North Jakarta .

**Keywords:** **Public Participation, Liability, Garage, Transportation**